

## LONJAKAN INFLASI INDONESIA DAN UPAYA PENGENDALIANNYA

19

Venti Eka Satya

### Abstrak

*Tingginya harga pangan dunia telah memicu inflasi tinggi di beberapa negara. Indonesia juga tengah bersiap menghadapi inflasi yang semakin tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat inflasi Juni 2022 mencapai 4,35% yoy. Tulisan ini bertujuan mengkaji faktor penyebab tingginya inflasi dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikannya. Penyebab utama tingginya inflasi adalah meningkatnya harga pangan, terutama disebabkan oleh terhambatnya rantai pasokan, cuaca, serta meningkatnya permintaan pascapandemi. Pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya inflasi yang tidak terkendali. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain dengan meningkatkan subsidi dan bantuan sosial. Upaya ini sesungguhnya hanya bersifat jangka pendek. Pemerintah perlu mencari solusi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. DPR RI, khususnya Komisi XI perlu mengawasi penggunaan anggaran subsidi agar subsidi tidak membebani APBN dan memperdalam defisit. Selain itu DPR RI juga perlu mengawasi kebijakan suku bunga acuan yang dilakukan Bank Indonesia.*

### Pendahuluan

Harga pangan dunia yang terus bergerak naik telah memicu inflasi tinggi di beberapa negara. Lebanon tercatat sebagai negara dengan inflasi harga pangan tertinggi di dunia, mencapai 374% pada April 2022, diikuti Venezuela (193%) dan Zimbabwe sebesar 155% (katadata.co.id, 14 Juni 2022). Inflasi di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa juga mencapai 8,6% dan 8,8% *year-on-year* (yoy), tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

AS diperkirakan akan mengalami resesi akibat bank sentralnya (*The*

*Fed*) yang sangat agresif menaikkan suku bunga guna meredam inflasi. Tingginya inflasi di AS telah membuat daya beli masyarakat tergerus. Seperti diketahui, konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung perekonomian AS. Ketika negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu mengalami resesi, maka akan berimbas ke negara lainnya (cnbcindonesia.com, 5 Juli 2022). Indonesia juga tengah bersiap menghadapi inflasi yang semakin tinggi. BPS mencatat, tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Juni) 2022 sebesar 3,19%



PUSLIT BKD



9 772088 235001

dan tingkat inflasi yoy (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 4,35% (bps.go.id., 1 Juli 2022).

Ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, serta penguncian di beberapa kota di China telah berdampak pada pasokan global. Hal ini tercermin dari tingkat inflasi global, tidak terkecuali Indonesia. Banyak ekonom yang menyarankan agar Bank Indonesia (BI) merespons hal ini melalui kenaikan suku bunga acuan. Sampai saat ini BI tetap mempertahankan suku bunga dengan pertimbangan Inflasi inti yang tetap rendah.

Tingginya angka inflasi Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan. Bila kenaikan bahan pangan pada Semester II 2022 tidak segera diantisipasi, inflasi akan meningkat secara substansial dan fundamental. Kecenderungan peningkatan inflasi semakin menguat seiring dengan semakin meningkatnya permintaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab tingginya tingkat inflasi Indonesia dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasinya.

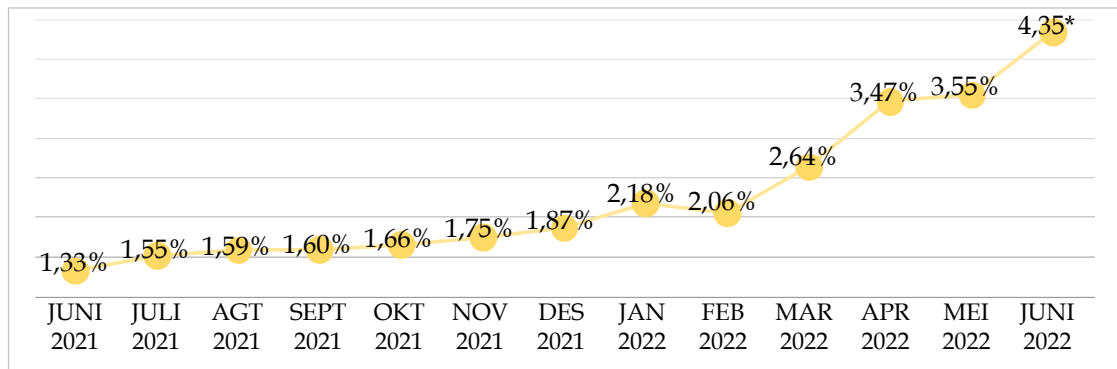
## Faktor Penyebab Tingginya Inflasi

Perkembangan harga pangan sebagai dampak risiko cuaca dan tekanan harga akibat restriksi ekspor di beberapa negara produsen pangan perlu diwaspadai pemerintah. Berdasarkan data BPS, peningkatan inflasi pada bulan Juni 2022 dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok *volatile food*, terutama beberapa komoditas hortikultura, di tengah penurunan inflasi inti dan kelompok *administered prices*. Secara tahunan, inflasi Indeks Harga

Konsumen (IHK) Juni 2022 tercatat 4,35% yoy, lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya. Pada akhir 2022, inflasi IHK diperkirakan sedikit lebih tinggi dari batas atas kisaran target, dan kembali ke dalam kisaran target  $3,0\pm 1\%$  pada 2023. Perkembangan tingkat inflasi Indonesia setahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1. Inflasi yang terjadi pada Juni 2022 meningkat cukup tajam dari bulan sebelumnya, dan tertinggi sejak Juni 2017.

Inflasi inti pada Juni 2022 tercatat 0,19% *month to month* (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi Mei 2022 yang sebesar 0,23% mtm. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas emas perhiasan seiring dengan pergerakan harga emas global. Penurunan lebih lanjut tertahan oleh inflasi harga komoditas upah asisten rumah tangga dan kontrak rumah yang didorong mobilitas masyarakat yang meningkat. Secara tahunan, inflasi inti Juni 2022 mencapai 2,63% yoy, meningkat dibandingkan periode bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,58% yoy (bps.go.id, 1 Juli 2022).

Kelompok *volatile foods* pada Juni 2022 mencatat inflasi 2,51% mtm, meningkat dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang semula 0,94% mtm. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh inflasi aneka cabai, bawang merah, dan telur ayam ras akibat kondisi cuaca yang mengganggu produksi dan peningkatan harga pakan. Kenaikan inflasi tertahan oleh deflasi pada minyak goreng seiring dengan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan minyak goreng serta deflasi daging sapi. Secara tahunan, kelompok *volatile foods* mengalami inflasi 10,07% yoy, meningkat dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya sebesar 6,05% yoy.



**Gambar 1. Inflasi Indonesia Periode 2021-2022**

Sumber: BI dan BPS 2022

Kelompok *administered prices* pada Juni 2022 mencatat inflasi 0,27% (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,48% mtm. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh pelambatan inflasi tarif angkutan udara seiring normalisasi pasca-hari besar keagamaan nasional. Penurunan inflasi lebih lanjut tertahan oleh inflasi rokok kretek filter seiring transmisi kenaikan cukai. Secara tahunan, kelompok *administered prices* mengalami inflasi 5,33% yoy, lebih tinggi dari inflasi bulan pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,83% yoy (bi.go.id, 1 Juli 2022).

Meskipun dunia terancam mengalami resesi, Indonesia dapat dikatakan masih aman karena inflasi masih terjaga, tetapi perlambatan ekonomi tentunya tetap terjadi. Tanda-tanda perlambatan sudah mulai terlihat. Ekspansi sektor manufaktur mulai melambat, bahkan nyaris mengalami kontraksi. S&P Global mengumumkan aktivitas manufaktur yang diukur dengan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Indonesia periode Juni 2022 berada pada angka 50,2. PMI menggunakan angka 50 sebagai tolok ukur, bila masih di atas 50 artinya masih berada di zona ekspansi. Akan tetapi PMI pada bulan Juni turun dibandingkan bulan

sebelumnya, sebesar 50,8. Skor PMI manufaktur Indonesia memang sudah 10 bulan beruntun di atas 50. Skor PMI bulan Juni menjadi yang terendah, hanya sektor kesehatan yang mengalami sedikit perbaikan.

Industri pengolahan merupakan kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB) berdasarkan lapangan usaha. Pada Kuartal I-2022 kontribusinya lebih dari 19% dari total PDB. Akibatnya ketika sektor manufaktur berkontraksi, akan berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, inflasi yang terus merangkak naik juga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Berdasarkan pengeluaran, belanja rumah tangga merupakan kontributor terbesar PDB dengan porsi mencapai 53,65% pada Kuartal I-2022. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga inflasi tidak melonjak (cnbcindonesia.com, 3 Juni 2022).

### Upaya Pengendalian Inflasi Domestik

Untuk meredam dampak kenaikan harga komoditas global terhadap inflasi, pemerintah telah menaikkan alokasi subsidi dan belanja sosial (*shock absorber*) yang akan dibiayai melalui peningkatan

penerimaan, sejalan dengan tingginya harga komoditas. Pemerintah memperkirakan defisit fiskal pada 2022 sebesar 3,9% dari PDB, menurun dibandingkan PDB Tahun 2021 yakni 4,6%. Rasio utang pemerintah tercatat sebesar 40,7% dari PDB pada akhir 2021, masih lebih rendah dibandingkan negara *peer*.

Pada sisi eksternal, neraca transaksi berjalan mencatatkan surplus pada 2021, didukung oleh perbaikan *terms of trade* seiring kenaikan harga komoditas, dan kembali mencatatkan surplus pada Triwulan I-2022. Cadangan devisa pada akhir Mei 2022 tercatat USD135,6 miliar, setara dengan lebih dari enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta jauh di atas utang luar negeri Indonesia yang jatuh tempo dalam satu tahun (bi.go.id, 1 Juli 2022). Hal ini membuat pemerintah menambah subsidi energi, untuk menghindari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan gas 3 kg.

BI masih belum mengeluarkan kebijakan penaikan suku bunga untuk meredam inflasi. Namun, BI siap menaikkan suku bunga ketika inflasi inti terus menanjak. Dari sisi nilai tukar, kinerja rupiah masih cukup baik dibanding mata uang Asia lainnya. Tingginya harga komoditas membuat neraca perdagangan Indonesia surplus pada 25 bulan terakhir. Akibatnya, transaksi berjalan juga ikut surplus dan membuat pasokan devisa mengalir ke dalam negeri. Kinerja rupiah pun tidak terlalu buruk, bahkan pada akhir Semester I-2022 pada saat permintaan valuta asing biasanya besar. Pada Kuartal II-2022, BI memperkirakan transaksi berjalan masih akan surplus, melanjutkan

surplus pada kuartal sebelumnya (cnbcindonesia.com, 3 Juli 2022).

Bank Indonesia terus mewaspadai risiko tekanan inflasi, khususnya terkait perkembangan harga komoditas global dan pangan, serta dampaknya pada ekspektasi inflasi serta mengambil kebijakan yang diperlukan untuk memastikan terkendalinya inflasi. BI juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Inflasi inti tetap terjaga di tengah permintaan domestik yang meningkat dan konsistensi kebijakan BI dalam menjaga ekspektasi inflasi (bi.go.id, 1 Juli 2022).

Mengingat pangan sangat penting bagi masyarakat, pemerintah akan terus mengantisipasi dan memitigasi risiko dari kenaikan harga kelompok pangan melalui berbagai kebijakan untuk menjamin kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan, pemerintah secara konsisten berupaya menjaga agar peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai *shock absorber* dapat berfungsi optimal untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat serta menjaga agar pemulihan ekonomi semakin menguat (kontan.co.id, 3 Juli 2022).

Berbagai upaya menjaga stabilisasi harga pangan nasional telah ditempuh oleh pemerintah, antara lain melalui pemberian insentif selisih harga minyak goreng, pelarangan sementara ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya untuk menjaga pasokan dengan harga terjangkau,

serta mempertahankan harga jual BBM, LPG, dan listrik (*administered price*) tidak mengalami peningkatan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga pangan pokok sehingga dapat melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Akan tetapi pengendalian harga yang dilakukan pemerintah seperti peningkatan subsidi dan penyaluran bantuan sosial hanyalah solusi jangka pendek. Pemerintah harus mencari alternatif pengendalian inflasi yang berdampak jangka panjang. Upaya penciptaan kemandirian pangan dan energi perlu menjadi perhatian pemerintah. Dalam mewujudkan kemandirian pangan, pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan lokal, baik dari sisi pertanian maupun industri pengolahan. Dari sisi energi, pemerintah perlu mendorong pengembangan sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, terutama minyak bumi, dimana Indonesia merupakan *net importer*.

### Penutup

Tingkat inflasi nasional dan global telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, bahkan beberapa negara di dunia telah mengalami hiperinflasi. Pada bulan Juni 2022, tingkat inflasi Indonesia mencapai 4,35% meningkat tajam dari bulan sebelumnya yang hanya 3,55%. Penyebab utama kenaikan inflasi ini adalah peningkatan harga pangan akibat terganggunya produksi dan rantai distribusi global. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipatif sebelum tingkat inflasi menjadi tidak terkendali.

Upaya pengendalian yang telah dilakukan pemerintah antara lain dengan meningkatkan subsidi dan bantuan sosial. Secara umum upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah hanya bersifat jangka pendek. Pemerintah perlu memikirkan upaya yang berdampak jangka panjang dan berkelanjutan seperti dengan meningkatkan produksi pangan nasional dan mengembangkan energi alternatif. DPR RI, khususnya Komisi XI perlu terus mengawasi penggunaan anggaran subsidi yang dilakukan pemerintah karena bila tidak terkendali dengan baik akan dapat mempersempit ruang fiskal dan memperdalam defisit. Selain itu peran BI dalam mengendalikan inflasi perlu diperhatikan, terutama melalui kebijakan pengendalian tingkat suku bunga acuan.

### Referensi

- "10 Negara dengan Inflasi Pangan Tertinggi, Ada yang Tembus 300%", 14 Juni 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/14/10-negara-dengan-inflasi-pangan-tertinggi-ada-yang-tembus-300>, diakses 4 Juli 2022.
- "BPS Press Release", 1 Juli 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/01/1862/inflasi-terjadi-pada-juni-2022-sebesar-0-61-persen-inflasi-tertinggi-terjadi-di-gunungsitoli-sebesar-2-72-persen.html>, diakses 5 Juli 2022.
- "Bukan Resesi Dunia Bakal Hadapi Long Recession?" 5 Juli 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220705185009-17-353195/bukan-resesi-dunia-bakal-hadapi-long-recession?page=all>, diakses 5 Juli 2022.



“Dunia Diramal Resesi Tahun Depan, Amankan Duit di Mana Nih?”, 3 Juli 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220703211925-17-352567/dunia-diramal-resesi-tahun-depan-amankan-duit-di-mana-nih/4>, diakses 7 Juli 2022.

“Inflasi di Indonesia pada Juni 2022 Jadi yang Tertinggi, Ini Penjelasan BKF Kemenkeu”, 3 juli 2022, <https://nasional.kontan.co.id/news/inflasi-di-indonesia-pada-juni-2022-jadi-yang-tertinggi-ini-penjelasan-bfk-kemenkeu>, diakses 6 Juli 2022.

“Publikasi Ruang Media BI”, 1 Juli 2022, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2416722.aspx#:~:text=Secara%20tahunan%2C%20inflasi%20IHK%20Juni,0%C2%B11%25%20pada%202023,diakses%205%20Juli%202022](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2416722.aspx#:~:text=Secara%20tahunan%2C%20inflasi%20IHK%20Juni,0%C2%B11%25%20pada%202023,diakses%205%20Juli%202022), diakses 5 Juli 2022.



Venti Eka Satya  
*venti.satya@dpr.go.id*

Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak., menyelesaikan studi Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Saat ini bekerja di Sekretarian Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Madya dengan bidang kepakaran Ekonomi Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa topik penelitian yang pernah dilakukan diantaranya, Analisis Penyelenggaraan Pengelolaan Kekayaan Negara Sumber Daya Alam, Strategi Kebijakan Investasi pada Era Otonomi Daerah, serta Strategi Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Mendukung Perekonomian Daerah. Karya tulis ilmiah penulis juga telah dipublikasikan di beberapa jurnal dan dalam bentuk buku.

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*